

**PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
DI JAWA TENGAH
(Studi Kasus Kabupaten Batang dan Pati)**

Wiwin Widiastuti dan Alfina Handayani

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah

Email: wiwinwidi@gmail.com

ABSTRACT

The research purposes are to analyze the performance of Coastal Community Economic Empowerment Program and to analyze the strategy of coastal community economic empowerment that appropriate to the need of coastal community. The research locus are Batang Regency and Pati Regency. Batang regency is the location of Coastal Community Economic Empowerment Program Implementation namely Coastal Women Empowerment Program, while Pati regency as the location of Salt Farmers Empowerment.

The research result show that the performance of Coastal Economic Empowerment Program in Central Java Province were assessed as good and appropriate to the need of coastal community, although part of the program were assessed not really appropriate to the need of coastal community. Only few of local government had budget allocation for coastal community economic empowerment assistance program. The foward strategy of coastal community economic empowerment program are to dig the community's real need, to socialize that it's need of community awareness to be empower, to do training, to facilitate market acces and bussiness facilities, and to assist the empowerment program by local government.

Keywords: Economic Empowerment, Coastal Community, Strategy of Empowerment Program

PENDAHULUAN

Masyarakat pesisir yang lebih dikenal dengan sebutan kelompok masyarakat nelayan memiliki tingkat kehidupan yang jauh tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya seperti kelompok masyarakat petani, pedagang, pegawai dan lain-lainnya. Sebagian besar anggota keluarga masyarakat pesisir termasuk anggota keluarga tidak produktif dari segi ekonomi dalam arti anggota keluarga hanya menggantungkan nasib pada hasil tangkapan ikan suami. Isteri hanya berperan sebagai ibu rumah tangga semata-mata. Hasil tangkapan ikan para suami dipasarkan oleh kelompok lain yang

tergolong lebih mapan ekonominya seperti pedagang ikan.

Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena di dalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya, masyarakat nelayan tangkap, masyarakat nelayan pengumpul/bakul, masyarakat nelayan buruh dan masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan

pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

Menurut Priyono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996), pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Sementara menurut Profesor Gunawan Sumodiningrat yang dikutip Riant Nugroho (2008), untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan: Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki, Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat, Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, harus dilakukan melalui beberapa kegiatan: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. di sinilah letak titik tolaknya yaitu bahwa pengenalan setiap manusia, setiap anggota masyarakat, memiliki suatu potensi yang selalu dapat terus dikembangkan. artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau demikian akan mudah punah Kartasasmita (1996). Untuk memberdayakan masyarakat diperlukan pendekatan utama adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek melainkan subyek dari berbagai upaya pembangunan oleh karena itu Kartasasmita (1997) upaya pemberdayaan harus terarah (*targeted*), program pemberdayaan harus

langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran dan menggunakan pendekatan kelompok

Setiap kelompok masyarakat tersebut membutuhkan upaya pemberdayaan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap misalnya, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok. Penelitian yang dilakukan oleh Fedriansyah (2008) mengenai evaluasi kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tugu, Semarang menunjukkan bahwa implementasi program dilihat dari sisi input, output, outcomes, keuntungan dan dampaknya ternyata belum sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat *bottom up* dan *open menu*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Pati dan Batang dan menganalisis strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

pesisir di kabupaten Pati dan Kabupaten Batang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian terapan non eksperimen bersifat deskriptif kualitatif dan evaluatif. Jenis penelitian yang digunakan ini, akan berpengaruh dan menentukan variable atau obyek maupun pokok persoalan yang akan diteliti dan sekaligus menentukan subyek sebagai sumber data serta penentuan rincian instrumen penelitian yang terkait dengan permasalahan dan tujuan penelitian (Arikunto, Suharsini 2002).

Penelitian dilaksanakan di dua kabupaten yaitu Kabupaten Pati dan Batang pada bulan April sampai dengan Juli 2013. Pengambilan lokasi sampel ditentukan secara purposif berdasarkan pertimbangan keberadaan program pemberdayaan baik dari Pusat maupun Propinsi yang dianggap dapat mewakili beberapa jenis program pemberdayaan yang ada. Pada masing-masing lokasi diambil 30 responden penerima program pemberdayaan. Masing-masing 10 responden untuk *indepth interview* dan 10 responden untuk *Focus Group Discussion* (FGD) yang terdiri dari: (1) *Stake holder* pengelolaan masyarakat pesisir di lokasi penelitian (2) Masyarakat pesisir yang tergabung dalam kelompok nelayan atau kelompok wanita nelayan. (3) SKPD yang terkait dengan kewenangannya dengan pengelolaan ekonomi masyarakat pesisir.

Jenis data yang diperlukan menurut pendekatan sumbernya adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder ini, seperti dokumen perencanaan dari Bappeda Kabupaten Pati dan Batang, data kegiatan produktif kegiatan dan pembinaan kelompok nelayan produksi dan pemasaran hasil olahan. Data primer, di antaranya: karakteristik responden (umur, pendidikan, pekerjaan utama, pendapatan, perilaku),

jenis dan pelaksanaan program pemberdayaan, kesesuaian program.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik dan tahapannya, yakni: 1) Pra Survei dan observasi lapangan, 2) Survei dengan wawancara menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dalam kuesioner, 3) Wawancara mendalam dengan partisipan kunci, 4) Diskusi terbatas dan terarah (FGD/*Focus Group Discussion*). Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

a. Karakteristik Masyarakat Pesisir

1) Umur Responden

Sebaran umur responden penelitian di Kabupaten Pati terbanyak adalah umur 36 - 40 tahun yaitu sebanyak 8 (delapan) orang atau sebesar 26 %, diikuti umur 41 - 45 tahun yaitu sebanyak 23 % dan 46 - 50 tahun, sebanyak 17%. Sementara di Kabupaten Batang adalah sebaran umur responden penelitian di Kabupaten Batang terbanyak adalah umur 46 - 50 tahun yaitu sebesar 30 % dari seluruh responden, diikuti umur 41-45 tahun yaitu sebanyak 26,67 % dan 51 - 55 tahun, sebanyak 16,67%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata responden masih berada pada umur produktif. Menurut Van den ban dan Hakwiks (1999), Usia tenaga kerja yang produktif berumur 16-64 tahun, sedangkan pada usia 65 ke atas sudah dikatakan usia lanjut. Usia produktif sangat berpengaruh terhadap kinerja seseorang terutama dilihat dari faktor fisik dan kematangan dalam berpikir. Pada umur muda fisik masih kuat dan bisa melakukan banyak pekerjaan.

2) Pendidikan Responden

Sebaran tingkat pendidikan responden penelitian di Kabupaten Pati terbesar adalah tamatan SMA sebesar 36,67%, diikuti SD sebesar 27,67%, tidak tamat SD dan setingkat SMP sebesar 13,33 %, perguruan tinggi sebesar 10%. Sebaran tingkat pendidikan responden penelitian di Kabupaten Batang terbesar adalah tidak tamat SD sebesar 36,67%, tamat SD sebesar 30,00%, tamat SLTP sebesar 16,67 %, tidak sekolah sebesar 13,33% dan tamat SLTA sebesar 3,33% dari seluruh jumlah responden.

3) Pekerjaan Utama

Sebaran pekerjaan utama responden penelitian di Kabupaten Pati adalah sebagai petani garam sekaligus petani tambak, yaitu sebesar 36,67%, diikuti pekerjaan utama sebagai nelayan sebesar 20%, ibu rumah tangga sebesar 16,67%, petani sebanyak 13,33%, perangkat desa sebesar 6,67%, guru dan pedagang sebesar 3,33%. Sebaran pekerjaan utama responden penelitian di Kabupaten Batang yang terbesar adalah sebagai pengolah dan pedagang ikan asap, yaitu sebesar 33,33%, diikuti pekerjaan utama sebagai ibu rumah tangga sebesar 23,33%, pedagang sebesar 16,67%, pembuat terasi sebesar 13,33%, petani sebesar 6,67%, nelayan dan peternak masing-masing sebesar 3,33%.

4) Pendapatan Responden

Pendapatan per bulan responden penelitian di kabupaten Pati

tertinggi adalah diatas Rp 4.000.000 sebanyak 16,67% responden, pendapatan terendah adalah kurang dari Rp. 1.000.000 sebanyak 13,33% responden. Frekuensi tertinggi dari penghasilan responden sebesar Rp 1.500.000 – Rp.1.999.000 sebanyak 26,67% responden, dengan tingkat rata-rata pendapatan sebesar Rp 2.628.074. Sementara di Kabupaten Batang tertinggi adalah diatas Rp 4.000.000 sebanyak 13,33% responden, pendapatan terendah adalah kurang dari Rp. 1.000.000 sebanyak 6,67% responden. Frekuensi tertinggi dari penghasilan responden sebesar Rp 1.500.000 – Rp.1.999.000 sebanyak 33,33% responden, dengan tingkat rata-rata pendapatan sebesar Rp 2.331.666. Berdasarkan kondisi tersebut pada kedua lokasi rata-rata masih belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL) sehingga dengan waktu luang 3-4 jam masih terdapat peluang untuk meningkatkan pendapatan.

5) Perilaku responden yang mendukung program pemberdayaan

Dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi di wilayah pesisir tercermin dari respon masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh responden penelitian di Kabupaten Pati (Tabel 1) dan Kabupaten Batang (Tabel 2)

Tabel 1. Perilaku responden di Kabupaten Pati yang mendukung program pemberdayaan

No	Uraian	Sangat Mendukung	Mendukung	Tidak Mendukung
1	Respon terhadap perbaikan ekonomi	70.00	30.00	00.00
2	Respon terhadap perbaikan teknologi	80.00	20.00	00.00
3	Respon terhadap perubahan sosial masyarakat	90.00	10.00	00.00
4	Partisipasi masyarakat	60.00	40.00	00.00
5	Motivasi masyarakat	70.00	30.00	00.00

Sumber : Data primer yang diolah (2013)

Tabel 2. Perilaku responden di Kabupaten Batang yang mendukung program pemberdayaan

No	Uraian	Sangat Mendukung	Mendukung	Tidak Mendukung
1	Respon terhadap perbaikan ekonomi	80.00	20.00	00.00
2	Respon terhadap perbaikan teknologi	60.00	40.00	00.00
3	Respon terhadap perubahan sosial masyarakat	80.00	20.00	00.00
4	Partisipasi masyarakat	50.00	50.00	00.00
5	Motivasi masyarakat	70.00	30.00	00.00

Sumber : Data primer yang diolah (2013)

Pada kedua lokasi penelitian menunjukkan bahwa perilaku semua responden sangat mendukung program-program pemberdayaan yang ada, yaitu: (1) pendapat mengenai diperlukannya perubahan/perbaikan terhadap keadaan ekonomi masyarakat desa dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir, > 70 % masyarakat sangat mendukung upaya perbaikan ekonomi melalui program, (2) pendapat mengenai diperlukannya

perbaikan cara-cara/teknologi yang dipergunakan dalam pengembangan usaha masyarakat desa dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir, > 60% responden menyatakan sangat mendukung terhadap perbaikan teknologi untuk pengembangan usaha melalui program pemberdayaan (3) pendapat mengenai diperlukannya perubahan terhadap keadaan sosial masyarakat di desa dengan pelaksanaan program

pemberdayaan masyarakat pesisir, > 80% responden menyatakan sangat mendukung upaya / proses perubahan sosial masyarakat desa melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir (4) partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir, > 50% responden menyatakan bahwa masyarakat memiliki partisipasi yang sangat tinggi dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir, (5) 70% responden menyatakan bahwa motivasi masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir.

b. Pelaksanaan Program Pemberdayaan

Responden penelitian di Kabupaten Pati merupakan masyarakat pesisir penerima Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) dan PUMP. PUGAR dilaksanakan oleh Dirjen Kelautan Pesisir dan pulau-pulau kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Program PUGAR di Kabupaten Pati yang berupa bantuan langsung masyarakat untuk sarana dan prasarana, untuk sarana dipergunakan untuk berusaha setiap hari seperti peralatan dan difokuskan untuk penggarap, kemudian untuk prasarana dipergunakan untuk pembuatan jalan produksi. PUGAR ini dilaksanakan sejak tahun 2011, yang dipergunakan fokusnya untuk peningkatan mutu garam dan fasilitasi pergudangan. Pada tahun 2012 kegiatan yang dilaksanakan masih sama. Sementara untuk tahun 2013 digunakan untuk pengembangan teknologi ulir filter (TUF) dan hampir

semua petani garam di empat kecamatan yaitu Kecamatan Batangan, Juwana, Wedarijaksa dan Trangkil sudah terdaftar sebagai kelompok penerima program. Besaran dana yang diberikan tidak sama tergantung dari luasan lahan tambak.

Sampel penerima PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) di Kabupaten Pati adalah Kelompok POKLAHSAR Tri Makaryo Lestari yang berdiri sejak tahun 2011 atau sudah 2 tahun dan beranggotakan 33 orang. Kelompok ini sudah mendapat pelatihan dan bantuan peralatan pengolah makanan seperti kompor dan tabung gas, dandang, kipas, penggorengan, alat presto (ikan kentring). Pelatihan yang dilakukan antara lain pembuatan nugget, krupuk, presto. Saat ini kelompok sudah memasarkan produk namun masih terbatas dilingkup lokal meskipun demikian kelompok ini sudah mampu melakukan kontinyuitas produksi karena sudah memiliki pasar.

Kelompok lain yang mendapat dana PUMP Perikanan Budidaya untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (pokdakan), adalah di Desa Suko Agung Kecamatan Batangan. Bantuan ini diberikan kepada kelompok sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati bersama oleh anggota kelompok. Pemberian bantuan pada kelompok ini sepertinya belum sesuai dengan kondisi potensi wilayah yang ada. Kasus yang terjadi adalah kelompok meminta bantuan untuk budidaya lele menggunakan kolam terpal, pada kenyataannya menghadapi permasalahan kegagalan produksi seperti pakan mahal, air sulit sehingga tidak ada kontinyuitas produksi.

Program Pemberdayaan Perempuan Pesisir di Kabupaten Batang dilaksanakan oleh Dirjen

Kelautan Pesisir dan pulau-pulau kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Studi kasus penelitian diambil untuk pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan Pesisir di Kabupaten Batang yang dilaksanakan oleh Dirjen Kelautan Pesisir dan pulau-pulau kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 yaitu di Desa Ujung negoro Kecamatan Kandeman dan Njrah Payung Kecamatan Tulis.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan Pesisir di Kabupaten Batang adalah melalui pelatihan pembuatan makanan/produk olahan ikan dan bantuan peralatan/sarana prasarana produksi makanan/produk olahan ikan. Pelatihan pemberdayaan perempuan pesisir berupa pelatihan mengenai : (a) pembuatan produk berbahan baku ikan,

(b) manajemen bisnis, (c) kapasitas kelembagaan dan akses permodalan, (d) kebijakan pemberdayaan perempuan pesisir di kabupaten. Sedangkan peralatan / sarana prasarana produksi yang diberikan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah berupa : peralatan pengasapan ikan. Sarana prasarana produksi yang diberikan program pemberdayaan perempuan pesisir dari Kementrian Kelautan dan Perikanan berupa, peralatan pembuatan terasi dan peralatan-peralatan produksi lain.

c. Implementasi Program Pemberdayaan Implementasi program pemberdayaan yang meliputi pengelolaan program, pendampingan, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan program menurut pendapat dari responden penerima program di Kabupaten Pati ditampilkan pada Tabel 3 dan di Kabupaten Batang ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 3. Prosentase Kesesuaian Implementasi Program Pemberdayaan di Kabupaten Pati

No	Uraian	Sesuai	Tidak sesuai	Tidak tahu
1	Pengelolaan program pemberdayaan ditingkat desa	66.67	6.67	26.67
2	Pendampingan program	66.67	16.67	16.67
3	Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat	70.00	3.33	26.67
4	Keberlanjutan program	63.00	10.00	26.00

Sumber: data primer diolah (2013)

Tabel 4. Prosentase Kesesuaian Implementasi Program Pemberdayaan di Kabupaten Batang

No	Uraian	Sesuai	Tidak sesuai	Tidak tahu
1	Pengelolaan program pemberdayaan ditingkat desa	23.33	53.33	23.33
2	Pendampingan program	76.67	00.00	23.33
3	Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat	63.33	23.33	13.33
4	Keberlanjutan program	56.67	23.33	20

Sumber: data primer diolah (2013)

Pada kedua lokasi kesesuaian implemantasi program pemberdayaan dilihat dari sisi pendampingan program, kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan program menurut sebagian besar responden penerima program sudah sesuai yang ditunjukkan dari lebih dari 56 % responden menyatakan sesuai, sementara untuk pengelolaan program pemberdayaan ditingkat desa di Kabupaten Batang 53 % menyatakan belum sesuai. Salah satu alasan karena responden menganggap ada kelompok yang selalu mendapatkan bantuan dikarenakan kedekatan dengan aparat desa dan bantuan yang diberikan pada akhirnya menjadi milik perorangan (seringkali ketua kelompok) dan bukan menjadi milik kelompok. Pada kasus lain ada pihak Pemerintah Desa yang tidak mengetahui sejauhmana program dan siapa penerimanya dikarenakan Program dari Pusat seringkali langsung ditujukan kepada kelompok penerima dan tidak melibatkan peran Pemerintah Desa.

2. Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

a. Permasalahan dan Kebutuhan Pemberdayaan Ekonomi

Di Kabupaten Pati permasalahan dan hambatan yang pada umumnya masih ditemui selama ini oleh petani garam diantaranya sebagai berikut : a) Aspek infrastruktur: berupa pendangkalan saluran penyuplai air laut, sarana dan prasarana produksi yang kurang memadai, b) Aspek produksi : berupa produktivitas lahan yang belum optimal, kadar NaCl garam yang masih rendah, c) Aspek tata niaga

: berupa tidak adanya kepastian harga dasar garam saat panen raya, rendahnya harga garam, kualitas dan posisi tawar petani, d) Aspek kelembagaan: berupa lemahnya organisasi kelompok, minimnya bimbingan teknis (pelatihan) bagi petambak garam, e) Aspek permodalan: lemahnya permodalan, kapasitas dan permodalan petani rendah.

Di Kabupaten Batang permasalahan dan hambatan yang umumnya masih ditemui selama ini dalam program pemberdayaan perempuan pesisir adalah: a) Pengetahuan dan ketrampilan para istri nelayan masih sangat kurang dalam memproduksi hasil olahan perikanan, b) Para istri nelayan mayoritas hanya mengandalkan hasil tangkapan nelayan, c) Kurangnya dukungan akses penguatan kelembagaan dan akses permodalan yang berpihak pada masyarakat dan usaha berbasis kelompok, d) Minimnya strategi teknologi informasi, komunikasi dan edukasi yang pro kegiatan pemberdayaan

b. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir di Kabupaten Pati terutama petambak garam, langkah-langkah diambil sebagai berikut :

- 1) Aspek infrastruktur meliputi: redesain tata letak lahan garam, pembuatan saluran induk pemasukan air laut, normalisasi saluran tambak dan pembuatan sarana jalan transportasi garam
- 2) Aspek produksi meliputi: penyediaan sarana dan prasarana dasar, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, peningkatan kualitas garam dengan SNI,

pelatihan dan pendampingan alih teknologi melalui demplot lahan lahan tambak garam

- 3) Aspek tata niaga: sosialisasi kegiatan usaha yang adil dan berkelanjutan, pendirian lembaga intermediasi antara produsen, distributor dan konsumen garam, regulasi penatausahaan garam, identifikasi dan analisis mata rantai tata niaga garam
- 4) Aspek kelembagaan: melaksanakan diklat tenaga pendamping dan penyuluh, pelatihan manajemen pemasaran/keuangan dan akses kepada permodalan, pembinaan usaha garam dan kualitas produksi kepada petambak garam serta pengolahan pasca panen.
- 5) Aspek permodalan: fasilitasi peningkatan kerjasama antar lembaga jasa keuangan dalam penyediaan kredit lunak, meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku usaha garam

Sementara, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat wanita nelayan di pesisir Kabupaten Batang, maka langkah-langkah diambil sebagai berikut :

- 1) Berbagai program pembangunan ke depan perlu menyediakan kesempatan kepada wanita nelayan untuk memiliki peluang yang sejajar dengan pria antara lain dengan merekrut tim kerja yang seimbang gender sehingga isu-isu perempuan dapat terwakili, melakukan analisis kebutuhan yang partisipatif melibatkan perempuan dan laki-laki untuk menentukan rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumber daya alam setempat; mendorong perempuan pesisir yang potensial untuk menjadi penggerak masyarakat dimana mereka

diharapkan dapat memotivasi kelompok perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan, memastikan perempuan dapat mengakses semua kegiatan, mendorong perempuan pesisir untuk dapat memegang kontrol kegiatan agar lebih percaya diri dalam pengambilan keputusan, mendorong perempuan pesisir untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan dan pengolahan sumberdaya, memanfaatkan strategi komunikasi, informasi dan edukasi yang berwawasan gender.

- 2) Melakukan program penguatan usaha berbasis kelompok. Pengembangan program pembangunan yang berbasis perikanan dan kelautan yang terpadu dengan kegiatan lainnya seperti wisata bahari merupakan peluang besar bagi aktualisasi peran wanita nelayan

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Kinerja Program Pemberdayaan :

- a) Karakteristik responden penerima program: umur responden rata-rata masih masih berada pada umur produktif, tingkat pendidikan responden di Kabupaten Pati terbesar adalah tamatan SMA dan SD, sementara di Batang terbesar tidak tamat SD dan SD, pekerjaan utama sebagian besar responden di Kabupaten Pati adalah sebagai petani garam sekaligus petani tambak, di Kabupaten Batang sebagai pengolah dan pedagang ikan asap.
- b) Perilaku responden di kedua lokasi sangat mendukung dalam pelaksanaan program-program pemberdayaan yang ada dilihat dari respon terhadap perbaikan ekonomi dan teknologi dan terhadap perubahan sosial yang rata-rata diatas 60 %, demikian pula untuk

tingkat partisipasi dan motivasi masyarakat dalam pelaksanaan program yang ada.

- c) Di Kabupaten Pati, tingkat kesesuaian pengelolaan program pemberdayaan ditingkat desa rata-rata >65%, Pendampingan program >65%, Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat sebesar 70 %, keberlanjutan program sudah sesuai sebanyak 63 %. Di Kabupaten Batang pengelolaan program pemberdayaan ditingkat desa hanya 23 % yang menyatakan sudah sesuai, pendampingan program sudah cukup baik 76 % menyatakan sudah sesuai, 63 % responden kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, sementara keberlanjutan program menurut 56 % responden sudah sesuai.
- d) Meskipun sebagian besar masyarakat penerima program pemberdayaan usaha garam rakyat menyatakan program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, namun masih terdapat bantuan peralatan berupa unit pengolah garam yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat petani garam, sehingga saat ini peralatan tidak digunakan oleh masyarakat penerima bantuan.
- e) Sebagian besar masyarakat penerima bantuan program pemberdayaan perempuan pesisir menyatakan bahwa bantuan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sampai saat ini peralatan masih dipergunakan dalam proses produksi.
- f) Terdapat petugas pendamping desa (fasilitator) pada program pemberdayaan petani garam di kabupaten Pati, namun tidak terdapat petugas pendamping (fasilitator) pada program pemberdayaan perempuan pesisir di kabupaten Batang.

2. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir :

- a) Penggalian kebutuhan riil masyarakat
- b) Sosialisasi tentang diperlukannya kesadaran masyarakat untuk berupaya memperbaiki taraf hidupnya, dan memecahkan persoalannya sendiri. Program pemberdayaan pemerintah hanya membantu memfasilitasi masyarakat.
- c) Pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan
- d) Fasilitasi peralatan kerja/produksi dan akses permodalan
- e) Pemetaan pemasaran produk dan distribusi pemasaran
- f) Fasilitasi pendampingan kegiatan dalam program pemberdayaan masyarakat dan pendampingan dana dari pemerintah kabupaten/kota

SARAN

- 1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota) harus bekerjasama dan bersinergi dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
- 2. Pemerintah daerah mengkoordinasikan program pemberdayaan masyarakat pesisir dengan melibatkan : Bappeda, Dinas Kelautan Perikanan, Bapermades, Bagian Perekonomian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM
- 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dilaksanakan secara terpadu/ terintegrasi dengan program yang lengkap meliputi :
 - a. Perencanaan kegiatan terpadu oleh pemangku kepentingan (Bappeda, Bapermades, Dinas Kelautan Perikanan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Bagian Perekonomian)

- b. Pelaksanaan kegiatan oleh dinas utama dan pendukung
- c. Fasilitasi pendampingan berupa tenaga dan/dana
- d. Penyediaan permodalan kerjasama dengan lembaga keuangan mikro

- yang sudah ada koordinasi Bagian Perekonomian dan Dinas Koperasi.
- e. Penyediaan akses pasar dan prediksi pengembangan pasar oleh Disperindagkop

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, (2002). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Fedriansyah, A.M. 2008. *Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) di Kecamatan Tugu, Semarang*. Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembelajaran yang Berakar Pada Masyarakat*. Jakarta : Bappenas.
- Kartasasmita. 1997. *Kemiskinan*. Jakarta : Balai Pustaka
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo
- Prijono, S. Onny dan A.M.W. Pranarka. 1996. *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.
- Van Den Ban. A.W. dan H.S Hawkins., 1999. *Penyuluhan Pertanian*. Kanisius. Yogyakarta